

STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH (Studi BUMDes Mitra Gama Pupuk Pertanian)

Desti Eka Putri¹, Hansen Rusliani², Sholichah³

destiekaputri1203@gmail.com¹, muhammadhansenrusliani@gmail.com²,
solichah@uinjambi.ac.id³

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tiga permasalahan utama dalam pengelolaan BUMDes Mitra Gama Pupuk Pertanian di Desa Gajah Mati, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu: keterbatasan modal untuk pengadaan pupuk dalam jumlah besar, fluktuasi harga pupuk yang berdampak pada harga jual dan margin keuntungan, serta pengelolaan administrasi dan stok pupuk yang belum efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi, member check, dan perpanjangan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Mitra Gama menerapkan sejumlah strategi seperti sistem pembayaran bertahap ("bayar setelah panen"), pemberdayaan tenaga kerja lokal, pelaporan keuangan secara transparan, dan kemitraan dengan lembaga keuangan. Strategi ini berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama petani sawit. Dari perspektif ekonomi syariah, strategi tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, amanah, serta penghindaran riba dan gharar. Namun demikian, BUMDes masih menghadapi kendala seperti keterbatasan modal operasional, ketergantungan pada satu distributor pupuk, rendahnya kapasitas SDM pengelola, serta minimnya pendampingan teknis dari pihak pemerintah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan dari stakeholder eksternal menjadi hal penting untuk keberlanjutan BUMDes ke depan.

Kata Kunci: BUMDes, Strategi Pengelolaan, Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

This research is motivated by three main problems in the management of BUMDes Mitra Gama Pupuk Pertanian in Gajah Mati Village, Babat Supat Subdistrict, Musi Banyuasin Regency: limited capital for large-scale fertilizer procurement, fluctuating fertilizer prices affecting selling prices and profit margins, and inefficient administration and fertilizer stock management. The purpose of this study is to analyze the management strategies of BUMDes in improving community welfare and to evaluate their alignment with the principles of Islamic economics. This study employs a qualitative approach using a case study method. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, and the data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The validity of the data was tested through triangulation, member checks, and extended observation. The results show that BUMDes Mitra Gama applies several strategies, such as installment-based payment systems ("pay after harvest"), empowerment of local labor, transparent financial reporting, and partnerships with financial institutions. These strategies have had a positive impact on improving the welfare of the community, particularly oil palm farmers. From the perspective of Islamic economics, these strategies are in line with the principles of justice ('adl), consultation (shura), trustworthiness (amanah), and the avoidance of usury (riba) and uncertainty (gharar). However, BUMDes still faces several challenges, such as limited operational capital, dependence on a single fertilizer distributor, low managerial capacity of its human resources, and minimal technical assistance from government authorities. Therefore, strengthening

institutional capacity and gaining support from external stakeholders are crucial for the sustainable development of BUMDes in the future.

Keywords: BUMDes, Management Strategy, Community Welfare, Islamic Economics.

PENDAHULUAN

Sejak Indonesia merdeka pembangunan desa telah menjadi fokus perhatian pemerintah, namun strategi pembangunan desa dari waktu ke waktu sering mengalami perubahan. Perubahan strategi yang dimaksudkan untuk menemukan strategi pembangunan desa yang dipandang paling efektif untuk kurun waktu tertentu. Pembangunan ekonomi merupakan hal utama dalam menggerakkan perekonomian suatu bangsa. Pembangunan ekonomi sebagai pusat pembangunan untuk mengutamakan kawasan pedesaan karena sekitar 70% penduduk Indonesia bertempat tinggal kawasan pedesaan. Oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan pembangunan kawasan pedesaan tersebut.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan desa salah satunya yaitu melalui program badan usaha milik desa (BUMDes) maka pemerintah daerah memfokuskan kepada perangkat desa untuk membentuk suatu badan keuangan melalui program bumdes tersebut. BUMDes ialah suatu lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat desa. Cara kerja bumdes yaitu dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap pada pendirian potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik menurut adat istiadat setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai sebuah usaha desa pembentukan BUMDes benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik desa dilandasi oleh undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 mengenai bumdes dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa.

Kebijakan pengembangan ekonomi perdesaan adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif dan kewirausahaan di desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Arah kebijakan pengembangan ekonomi perdesaan tetap berbasis kepada kegiatan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, namun dalam rangka meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja perdesaan, perlu dikembangkan pula berbagai kegiatan non pertanian, sehingga kebijakan pengembangan ekonomi perdesaan harus meliputi meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi tepat guna.

Ekonomi Islam merupakan bentuk implementasi adanya aturan-aturan dalam Islam yang mengatur tentang adanya kegiatan ekonomi dan perilaku transaksi manusia dengan menggunakan prinsip dan nilai-nilai yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadist. Pelaku ekonomi Islam dalam setiap kegiatannya selalu mengedepankan adanya nilai ketuhanan dalam setiap kegiatannya selalu dibarengi adanya niat dan harapan untuk mencari ridho berkah dari Allah SWT. Semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia khususnya dalam bidang usaha, maka peluang berkembangnya usaha-usaha di Indonesia semakin terbuka lebar.

Begitu juga peluang berkembangnya BUMDes ini, karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Di sisi lain, harga pupuk jenis urea dan NPK yang terus

meningkat dari tahun ke tahun Rp 300.000 per sak, sekarang Rp 1,1 juta-1,2 juta semakin menambah beban petani, terutama petani kecil. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah agar BUMDes dapat menjalankan perannya secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes mengalami kesulitan dalam memperoleh modal yang cukup untuk membeli pupuk dalam jumlah besar, yang menyebabkan stok pupuk terbatas. Keterbatasan stok ini memengaruhi kemampuan BUMDes untuk memenuhi permintaan petani yang terus meningkat setiap tahunnya. Akibatnya, penjualan pupuk tidak maksimal, yang berdampak pada pendapatan. Manajemen BUMDes yang kurang efisien juga menjadi faktor penghambat. Pengelola yang mayoritas merupakan warga desa tanpa latar belakang bisnis yang memadai sering kali kesulitan dalam mengelola keuangan, administrasi, dan distribusi stok pupuk secara efisien. Hal ini mengganggu kelancaran operasional dan menyebabkan BUMDes tidak dapat memaksimalkan potensi anggaran dan pendapatan yang tersedia.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, merasa penting untuk melakukan kajian mengenai strategi pengelolaan BUMDes dalam distribusi pupuk pertanian dengan meninjau dari perspektif ekonomi syariah. Studi ini difokuskan pada BUMDes Mitra Gama Desa Gajah Mati Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, yang menjadi representasi BUMDes aktif dalam sektor pertanian, khususnya dalam penyediaan pupuk bagi masyarakat petani.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak, oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tapi lebih menekankan pada makna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Pengelolaan BUMDes Mitra Gama Pupuk Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

BUMDes Mitra Gama Pupuk Pertanian dibentuk sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat petani sawit di Desa Gajah Mati, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, akan akses input pertanian yang terjangkau dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, BUMDes ini memfokuskan pengelolaannya pada pemenuhan pupuk secara efisien, pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta menciptakan sistem pembayaran yang mempermudah petani. Strategi ini menunjukkan pendekatan partisipatif dan pro-rakyat, sebagaimana juga ditemukan pada hasil penelitian yang menyatakan bahwa keberhasilan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam merumuskan strategi berbasis kebutuhan nyata masyarakat melalui pendekatan perencanaan partisipatif dan data faktual lapangan.

Untuk mengatasi kendala permodalan, BUMDes Mitra Gama menerapkan sistem pembayaran bertahap atau "bayar setelah panen". Sistem ini memberikan ruang gerak ekonomi bagi petani sawit yang sering kesulitan modal saat musim tanam. Lega & Wahid dalam penelitiannya menyebutkan bahwa fleksibilitas transaksi seperti ini merupakan ciri utama dari model kewirausahaan sosial yang efektif dalam konteks pedesaan. Model ini tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga mempererat hubungan sosial antara lembaga dan masyarakat.

BUMDes juga merekrut tenaga kerja lokal dalam proses distribusi dan administrasi, yang menciptakan peluang kerja dan memberdayakan masyarakat desa. Keberhasilan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat tidak hanya berasal dari hasil usaha, tetapi juga dari pelibatan warga dalam struktur operasional BUMDes. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap lembaga desa dan memperkuat hubungan sosial.

2. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Strategi Pengelolaan BUMDes

Dalam perspektif ekonomi syariah, pengelolaan BUMDes idealnya berlandaskan pada prinsip-prinsip muamalah yang menjunjung nilai keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan pemberdayaan umat. Strategi pengelolaan BUMDes Mitra Gama di Desa Gajah Mati memperlihatkan keselarasan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Pertama, prinsip keadilan (*'adl*) tercermin dalam usaha BUMDes melibatkan masyarakat secara adil dan merata dalam proses usaha dan distribusi manfaatnya. Sebagaimana menurut Syafii Antonio, prinsip *'adl* merupakan fondasi utama dalam ekonomi Islam yang mendorong keadilan distribusi dan pemberdayaan yang merata. Kedua, penerapan prinsip musyawarah (*syura*) dalam pengambilan keputusan menegaskan bahwa masyarakat dilibatkan secara aktif dalam musyawarah desa. Hal ini mendukung pendapat Aprilya & Tohawi, bahwa *syura* penting dalam menciptakan tata kelola yang demokratis dan akuntabel dalam konteks ekonomi Islam.

Ketiga, prinsip amanah dan transparansi dijalankan melalui pelaporan dan pengawasan keuangan secara terbuka. Keempat, penghindaran riba dan gharar dijalankan dengan tidak adanya praktik bunga atau ketidakjelasan dalam transaksi. Strategi usaha BUMDes didasarkan pada sektor riil seperti pupuk dan hasil kebun. Penelitian oleh Hosen (2020) menguatkan bahwa penguatan sektor riil merupakan bentuk implementasi muamalah yang sesuai syariah dan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, strategi pengelolaan BUMDes Mitra Gama tidak hanya menunjang pemberdayaan ekonomi desa, tetapi juga memenuhi kriteria ideal ekonomi syariah yang berlandaskan nilai-nilai ilahiyah, akhlak, dan keadilan sosial.

3. Kendala Pengelolaan BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Meskipun BUMDes Mitra Gama Pupuk Pertanian di Desa Gajah Mati, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin telah menjalankan berbagai program yang berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat desa, dalam praktiknya tetap menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan modal operasional. Modal yang dimiliki BUMDes masih terbatas, sehingga belum mampu memenuhi permintaan pupuk petani sawit secara maksimal, terutama pada saat musim tanam. Pengadaan pupuk dalam jumlah besar tidak bisa dilakukan karena BUMDes harus melakukan pembayaran tunai kepada distributor. Hal ini berdampak pada kelangkaan pupuk dan menurunkan kepercayaan petani terhadap keberadaan BUMDes. Seperti disampaikan oleh Sekretaris BUMDes dalam wawancara, keterbatasan modal membuat mereka tidak mampu membeli pupuk dalam jumlah besar meskipun permintaan sedang tinggi. Kepala Desa Gajah Mati pun mengakui bahwa kemampuan pengelola masih terbatas, namun mereka sedang mengupayakan kerja sama dan pelatihan untuk memperbaiki hal tersebut.

Selain modal, BUMDes juga menghadapi kendala dalam hal ketergantungan pada satu distributor. Saat ini, BUMDes hanya menjalin kemitraan dengan satu pemasok pupuk dari Palembang. Ketika distributor mengalami kendala logistik atau kenaikan harga, seluruh rantai distribusi di BUMDes ikut terganggu. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan pengiriman pupuk dan menimbulkan protes dari petani, seperti yang diungkapkan oleh Bendahara BUMDes. Ketergantungan ini juga berdampak pada kapasitas layanan BUMDes

yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh warga desa yang berharap agar program BUMDes bisa mencakup lebih banyak penerima manfaat.

Kendala lain yang tak kalah penting adalah minimnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola BUMDes. Sebagian besar pengelola merupakan warga lokal yang belum memiliki latar belakang manajerial atau pelatihan keuangan yang memadai. Proses pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan masih dilakukan secara manual, yang rawan terjadi kesalahan. Hal ini diakui oleh Bendahara BUMDes yang menyatakan bahwa belum semua pengurus familiar dengan pembukuan berbasis aplikasi, dan pelatihan manajemen belum dilakukan secara rutin. Kurangnya kompetensi ini menjadi hambatan serius dalam menjaga akuntabilitas dan efisiensi usaha BUMDes.

Di sisi lain, dukungan regulasi dan monitoring dari pihak pemerintah juga belum optimal. Meskipun sudah ada landasan hukum dari pemerintah desa, namun pendampingan teknis dan evaluasi dari dinas terkait di tingkat kabupaten masih minim. BUMDes pada praktiknya berjalan sendiri dengan dukungan terbatas dari Dana Desa. Seperti yang dijelaskan oleh aparat desa, intensitas pembinaan dari pihak luar, seperti dinas koperasi atau pendamping desa, masih rendah, padahal pelatihan dan evaluasi rutin sangat dibutuhkan agar BUMDes dapat berkembang lebih sistematis dan profesional. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan BUMDes tidak hanya bergantung pada strategi internal, tetapi juga pada dukungan ekosistem kebijakan yang mengarah pada penguatan kapasitas kelembagaan, akses modal, dan pendampingan berkelanjutan.

Berbagai kendala tersebut sesuai dengan temuan dalam sejumlah studi. Salah satunya Rony Jaya menyebutkan bahwa hambatan dalam pengembangan BUMDes Rempak Maju jaya diantaranya adalah rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM pengelola yang masih minim pengalaman dan jiwa wirausaha sehingga berdampak pada stagnasi unit usaha BUMDes. Selanjutnya adalah Faktor komunikasi yang tidak efektif dan terbatasnya beberapa arus informasi disepertaran elit desa. Perbedaan penafsiran terhadap regulasi terkait BUMDes, rendahnya partisipasi dan dukungan masyarakat serta skala dan jangkauan usaha yang ada masih terbatas.

KESIMPULAN

Pengelolaan BUMDes Mitra Gama Pupuk Pertanian di Desa Gajah Mati menunjukkan keberhasilan strategis dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat desa, khususnya petani sawit, melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan ekonomi lokal. Strategi seperti sistem pembayaran pasca panen, pelibatan tenaga kerja lokal, kemitraan lembaga, serta edukasi pertanian telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi syariah, strategi yang dijalankan telah mencerminkan prinsip muamalah seperti keadilan (*ʿadl*), musyawarah (*syura*), amanah, transparansi, serta penghindaran riba dan *gharar*. Artinya, pengelolaan BUMDes ini tidak hanya sesuai secara ekonomi pragmatis, tetapi juga memenuhi standar etis dan spiritual dalam Islam. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan modal operasional, ketergantungan pada satu distributor, rendahnya kapasitas SDM pengelola, dan kurangnya dukungan teknis dari pihak pemerintah. Hal ini menghambat keberlanjutan dan ekspansi program BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Pt Sygma Examedia ArkanLeema, 2007)

Buku

Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif. CV. Syakir Media Press, 2021.

- Aini, Nurul. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Desa Wisata Pantai Tanjung Bias Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2022.
- Busyro. Maqâshid al-syari'ah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah. Jakarta Timur: Prenada Media, 2019.
- Efendi, Azis. Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sukaraja Jerowaru Lombok Timur. Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
- Hasanah, Lusi Andriyani, dkk., Buku Manajemen BUMDes untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa. Bogor: UM Jakarta Press, 2021.
- Hikmawati, Fenti. Metodologi Penelitian. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Hilmi, Muhamad. Dinamika Ekonomi Syariah Di Indonesia. Mataram: CV. Al-Haramain Lombok, 2025.
- Kamal, Al Haq, Fatmawati Sungkawaningrum, dan Yulia Agustina. Dasar-Dasar Ekonomi Syariah. Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2024.
- Latif, Abdul. Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam. 2015.
- Listyaningsih, Erna, dan Apip Alansori. Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2020.
- Mahri, Jajang W, Nur Rianto Al Arif, dkk., Ekonomi Pembangunan Islam. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesi, 2021.
- Masyhuri, Ahmad Ari, dan Chairunnisa. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. PT Media Penerbit Indonesia, 2023.
- Muhammad, Faisal. Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris. Makassar: Garis Khatulistiwa, 2019.
- Muhyiddin, Nurlina T, M Irfan Tarmizi, dkk., Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial: Teori, Konsep, dan Rencana Proposal. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Murdiyanto, Eko. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), 2020.
- Nachrawi, G. BUMN sebagai usaha pemerintah menuju kesejahteraan rakyat: Tinjauan filosofis, sosiologis, politis dan yuridis. Cendekia Press, 2021.
- Ngadisah, dan Almaarif. Peran dan Fungsi BUMDes Dalam Pembangunan Perdesaan (Studi Pada Desa Bleberan Kecamatan Playen DIY). Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2019.
- Nilamsari, Natalina. Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. Universitas Prof. Dr. Moestopo 13, No. 2 (2014).
- Nurfaqih, Muhammad Isnani, dkk., Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) dalam Perspektif Ekonomi Islam, No. 8 (2018): Universitas Islam Indonesia.
- Nur, Muh. Mewujudkan Kesejahteraan dengan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024.
- Pujaasutawa, Ida Bagus Gde. Teknik Wawancara dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi. Universitas Udayana, 2016.
- Purba, Elidawaty, Bonaraja Purba, dan Ahmad Syafii. Metode Penelitian Ekonomi. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Raharjo, Muhamad Mui'z. Pokok-Pokok Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Sugiyono. Metode Penelitian. Dalam Metode Penelitian. Yogyakarta: ALFABETA, 2019.
- Suparji. Pedoman Tata Kelola BUMDes. Jakarta: UAI Press, 2019.
- Syarifuddin, Fitriana & Arfah, Iroh Rahmawati, dan Sri Mulyono. Ekonomi Syariah. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- Yola Miranda, dan Simson Ginting. Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Bukit Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat 4, No. 2 (2024).
- Ikhsan, Nur, Roni Ismoyojati, Yulio Kristian Tinduh, dan Ihda Andrey Yanuar. Sosialisasi Best Management Practice (BMP) Kelapa Sawit di BUMDes Berkah Mulya Jaya Kabupaten Lamandau 3, No. 2 (2025).
- lega, Michael, dan Makmun Wahid. Penguatan Kapasitas BUMDes Untuk Kewirausahaan Sosial

- Petani Sawit 5, No. 1 (2022).
- Susilowati, Lina, dan Yulia Effrisanti. Analisis Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tani Unggul Desa Banjardowo Jombang 18, No. 2 (2022).
- Yatin, Sri, Ahmad Rifai, Sigit Triharjono, dan Sugiarto. Bangsa Menjadi Indonesia : Pemerataan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat. Lintas Media, 2018.
- Yustina, Farida, dan Arif Purbantara. Modul KKN TEMATIK Desa Membangun Badan Usaha Milik Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019.